



Harisson Dampingi Reses Komisi V DPR di Kapuas Hulu

PUTUSSIBAU-Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson turut menghadiri agenda reses Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Pendopo Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (11/10). Dalam kesempatan itu, Harisson menyampaikan apresiasi kepada Komisi V, atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kalbar.

Apalagi menurutnya, Pemprov memiliki tantangan dalam pembiayaan infrastruktur. Khususnya untuk perbaikan infrastruktur jalan, dengan total panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov mencapai 1.534 kilometer.

"Dan hari ini memang sengaja saya mendampingi Komisi V, semoga sinergitas ini tetap terus terjalin. Karena seyogyanya pembangunan di Kalbar memerlukan kolaborasi semua pihak," ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta klarifikasi terkait

kewenangan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Serta menyoroti perlunya transformasi jalan-jalan provinsi, menjadi jalan nasional, dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Terkait pembangunan di sektor transportasi, Harisson mengatakan, khusus Bandara Supadio, Pemprov akan terus berupaya menjaga statusnya sebagai bandara internasional. Itu agar dapat memastikan konektivitas internasional, tetap berjalan di daerah ini.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebutkan, kunjungan kerja pihaknya di daerah ini, bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap program kegiatan yang dijalankan.

Reses bersama Komisi V DPR RI menurutnya menjadi forum penting dalam upaya bersama untuk memajukan

infrastruktur dan pembangunan di Kalbar. "Terkait pembangunan infrastruktur kami melaporkan perkembangannya positif," katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti aspirasi masyarakat dan kebutuhan untuk mengalihkan kewenangan jalan provinsi ke pemerintah pusat, dan kabupaten, untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).

Kemudian Lasarus juga menekankan perlunya mengatur kebijakan secara komprehensif dan menjelaskan rencana mengajukan revisi terkait jalan, dan kewenangan pemerintah pusat. Sementara terkait isu izin pembangunan dan pengelolaan taman nasional, ia menekankan pentingnya koordinasi antar instansi, dan kewenangan yang jelas dalam memastikan keberlanjutan pembangunan. *(bar/r)*



BIRO ADPIM KALBAR FOR PONTIANAK POST

TINJAU: Harisson bersama Ketua dan Anggota Komisi V DPR RI meninjau pembangunan perkuatan tebing Sungai Kapuas Hulu, Rabu (11/10).